





PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

UNIT KERJA : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : H. LALU HERMAN MAHAPUTRA

2. Jabatan : DIREKTUR

3. NHK : **426151**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 12.390.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 700 m2/500 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 2.770.000.000
- Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 710.000.000
- 3. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 710.000.000
- 4. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 710.000.000
- Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL
 SENDIRI Rp. 710.000.000
- Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 710.000.000
- Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 710.000.000
- 8. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 710.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA
 MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 3.050.000.000
- Tanah Seluas 2.069 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL
 SENDIRI Rp. 650.000.000
- 11. Tanah Seluas 113 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL



SENDIRI Rp. 150.000.000

12. Tanah Seluas 697 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM . HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

1.055.000.000

MOBIL, DAHAITZU GRAND MAX Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

MOBIL, MERCEDES SEDAN Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.

M	M	Rp.	1.950.000.000
-1	-1	Rp.	
KPI	KPI	Rp.	1.491.551.109
		Rp.	4.831.375.296
WOK-	MPK-	Rp.	21.717.926.405
		Rp.	4.013.850.000
OK.	016.	Rp.	17.704.076.405
	KOK	KOK KOK	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

Catatan:

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.